

**ANALISIS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM
PENGENDALIAN BIAYA STANDAR PRODUK
PTPN II TANJUNG MORAWA**

Maya Andriani

Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Profesional Indonesia

email: mayaandriani6@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah akuntansi pertanggungjawaban pengendalian biaya standar produk pada PT Perkebunan Nusantara II serta untuk mengetahui prosedur akuntansi pertanggungjawaban pengendalian biaya standar produk pada PT Perkebunan Nusantara II. Metodologi penelitian dalam memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Sedangkan pengumpulan untuk memperoleh data penulis melakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik menganalisis data yaitu dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu berdasarkan jurnal dan teori-teori yang ada dengan peristiwa yang terjadi saat penelitian dilakukan.

Biaya produksi merupakan perhatian serius dalam kegiatan perusahaan manufaktur. Perhitungan dan pencatatan biaya produksi menjadi hal utama yang perlu dilakukan oleh perusahaan dan diterapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa memiliki perencanaan dan pengendalian biaya standar produk yang perlu diperhatikan dari berbagai sisi. Pada penerapannya, PT Perkebunan Nusantara II telah memenuhi standar akuntansi. Hasil penelitian yang diperoleh; akuntansi pertanggungjawaban atas pengendalian biaya standar produk telah diterapkan dengan baik dan telah melalui prosedur PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa. Efeknya biaya standar produk telah efektif untuk mencapai tujuan PT Perkebunan Nusantara II.

Kata Kunci: Penerapan, Akuntansi, Biaya

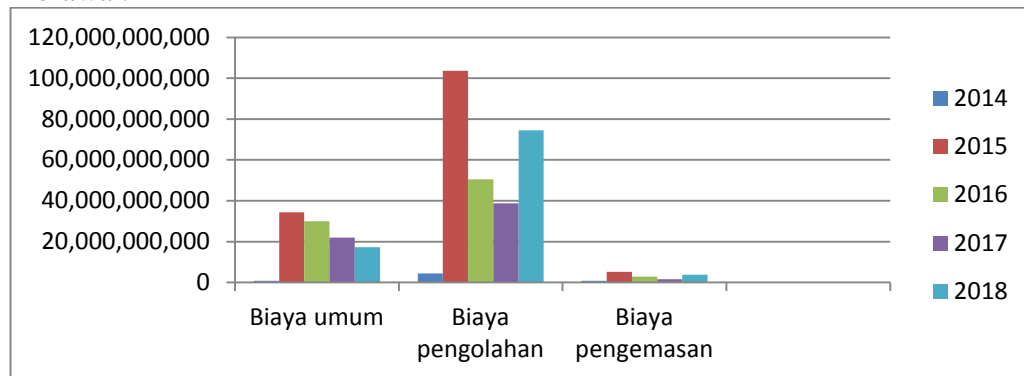
PENDAHULUAN

PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa, pusat biaya didelegasikan kepada setiap manajer pusat biaya yang terdapat pada perusahaan. Pada akhirnya, akan dilakukan penilaian terhadap kinerja manajer tersebut berdasarkan laporan pertanggung jawaban yang dibuat. Penulis juga ingin mengetahui sejauh mana sistem akuntansi pertanggung jawaban digunakan sebagai alat pengendalian biaya standar produk pada PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa itu sendiri. Dengan menggunakan sistem akuntansi pertanggung jawaban, perusahaan mengharapkan kinerja para karyawan dalam mempertanggung jawabkan tugasnya di masing-masing bagiannya agar dapat termotivasi.

Bagian akuntansi setiap bulannya membuat laporan akuntansi pertanggung jawaban untuk setiap bagian pusat biaya. Setiap awal bulan membuat rekapitulasi biaya atas dasar biaya bulan ini. Isi dari laporan akuntansi pertanggung jawaban disesuaikan dengan tingkat manajemen yang akan menerimanya. Laporan akuntansi pertanggung jawaban tersebut merupakan alat pengawasan biaya, oleh

karena itu dalam penyusunan anggaran data biaya kebijakan belum dipisahkan biaya mana saja yang dapat diawasi dan mana yang tidak dapat diawasi oleh pusat pertanggung jawaban karena perusahaan belum mengklarifikasikan biaya yang tidak dapat dikendalikan dan biaya yang dapat dikendalikan dalam anggaran kemudian diproses kedalam laporan akuntansi pertanggung jawabannya.

Pengendalian biaya melalui akuntansi pertanggung jawaban dapat dijalankan dengan cara menyelenggarakan rancangan suatu sistem perencanaan atas biaya-biaya yang dapat dikendalikan. Dari sistem pencatatan ini akan dihasilkan laporan-laporan biaya yang menunjukkan bagaimana manjer memenuhi tanggung jawabnya atas biaya yang terjadi dalam organisasinya. Berikut rancangan anggaran biaya produksi para PTPerkebunan Nusantara II Tanjung Morawa :



Gambar 1:
Laporan Pertanggung Jawaban PT.Perkebunan Nusantara II
Tanjung Morawa Tahun 2014 s/d 2018
Anggaran

Berdasarkan gambar 1 diatas terdapat perbedaan anggaran dan realisasi dari tahun 2014 s/d 2018, dimana selisih yang terjadi pada biaya pengemasan ditahun 2014 anggaran sebesar Rp.843.563.000 dan realisasinya Rp.1.380.136.815 dengan selisih Rp.536.573.815. Pada tahun 2017 terjadi selisih pada biaya umum dan biaya pengemasan dimana anggaran pada biaya umum sebesar Rp.21.904.642.000 dan realisasinya Rp.27.503.392.793 dengan selisih Rp.5.598.750.193. Dimana anggaran pada biaya pengemasan sebesar Rp.1.643.514.000 dengan realisasi Rp.5.967.590.791 dengan selisih sebesar Rp.4.324.076.791.

Bagian akuntansi setiap bulannya membuat laporan akuntansi pertanggung jawaban untuk setiap bagian pusat biaya. Setiap awal bulan membuat rekapitulasi biaya atas dasar biaya bulan ini. Isi dari laporan akuntansi pertanggung jawaban disesuaikan dengan tingkat manajemen yang akan menerimanya.

Laporan akuntansi pertanggung jawaban tersebut merupakan alat pengawas biaya, oleh karena itu dalam penyusunan anggaran biaya kebijakan belum dipisahkan biaya mana saja yang dapat diawasi dan mana yang tidak dapat diawasi oleh pusat pertanggung jawaban karena perusahaan belum mengklarifikasi dalam anggaran kemudian diproses kedalam laporan akuntansi pertanggung jawaban.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Pertanggung Jawaban

Sistem ini diciptakan untuk memberikan keleluasan kepada manajer untuk mengelola bagian organisasi yang dipimpinnya secara optimal sebagai salah satu model desentralisasi. Makin luas suatu organisasi, maka semakin membutuhkan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada manajemen tingkat bawah yang ada pada perusahaan. Menurut Samryn (2012:261): Akuntansi pertanggung jawaban adalah suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggung jawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggung jawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen.

Pengendalian

Pengendalian dilakukan untuk mengarahkan aktivitas perusahaan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat dinyatakan bahwa pengendalian merupakan fungsi manajemen yang melakukan pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas perusahaan untuk menjamin bahwa operasi perusahaan telah berjalan dengan apa yang telah direncanakan dan beroperasi dengan efektif dan efisien. Menurut Karyoto (2016:117) Pengendalian adalah fungsi pengendalian (*controlling*) diterapkan untuk menghentikan berbagai pelanggaran pekerjaan yang dapat menimbulkan pemborosan-pemborosan. Adanya pemborosan menandakan bahwa pekerjaan tidak dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Sedemikian pentingnya memahami berbagai pelanggaran pekerjaan yang terjadi dalam organisasi sehingga para pemimpin organisasi harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya.

Biaya Standar

Standar dibuat berdasarkan kombinasi yang tepat antara pengalaman dan pengetahuan atau antara praktik dan teori. Dengan pengalaman saja belum cukup sebab pengalaman itu bersifat sangat individual, pengetahuan saja tidak cukup untuk membuat standar yang baik karena teorinya yang bersifat ideal. Standar mempunyai dua unsur fisik (volume kegiatan) dan keuangan (pendapatan dan biaya). Biaya standar menurut Dwi Utari, Ari Purwanti dan Darsono Prawironegoro (2016:215) adalah biaya yang ditetapkan lebih dahulu sebelum proses produksi dimulai, atau sebelum suatu kegiatan dimulai. Biaya standar menurut William (2009:158) adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama periode tertentu.

Alokasi Biaya

Pembebanan biaya tidak langsung keobjek biaya tersebut alokasi. Hal ini disebabkan karena biaya tersebut tidak ada hubungan sebab-akibat dengan objek biaya. Contohnya biaya overhead pabrik departemen produksi dan departemen pembantu produksi. Biaya-biaya ini dialokasikan keobjek biaya (pada umumnya kebiaya produksi) atas dasar kewajaran dan keumuman. Misalnya biaya buruh, biaya material, dan jumlah output yang dihasilkan, sedangkan biaya overhead

departemen pembantu produksi dialokasikan kebiaya overhead departemen produksi atas dasar luas lantai, jumlah karyawan dan sebagainya

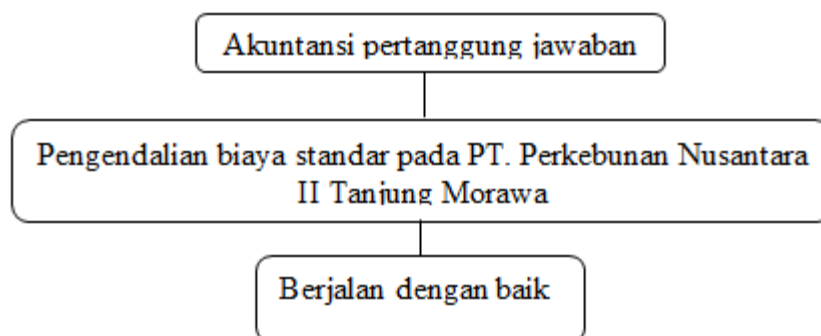
Biaya

Biaya sangat penting dalam menjalankan kegiatan perusahaan, setiap perusahaan tidak akan dapat menghindari berbagai biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan laba. Maka perusahaan harus dapat menghasilkan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikorbankan. Menurut Mulyadi (2015:8) : Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.”

Kerangka Pemikiran Teoritis

Akuntansi pertanggung jawaban adalah faktor yang sangat penting dalam mengambil keputusan untuk menentukan langkah yang harus diambil oleh manajer dalam memperbaiki potensi kerja karyawan. Informasi dalam akuntansi pertanggung jawaban sangat penting untuk proses perencanaan dan pengendalian aktivitas dengan informasi manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan.

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:



Gambar 2: Kerangka Pemikiran Teoritis

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif, dimana dalam penelitian ini yang digunakan adalah menguraikan sifat-sifat dan karakteristik, gambaran secara sistematis pada suatu objek penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan biaya produksi dari tahun 2014 sampai 2018 pada PT Perkebunan Nusantara II. Jumlah data yang digunakan sesuai dengan jumlah keseluruhan populasi yaitu 5 data. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representative* (mewakili) dari sampel yang dipilih. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data sampel dari anggaran dan realisasi biaya produksi pada PT Perkebunan Nusantara II periode 2014 s/d 2018.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan melakukan penelitian :

1. Observasi
Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek penelitian untuk melengkapi data yang tidak terkumpul melalui wawancara.
2. Wawancara
Merupakan teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian agar data yang diperoleh akurat.
3. Dokumentasi
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung. Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara melihat dan menggunakan laporan dan catatan yang ada pada perusahaan.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan uraian data di atas, penulis akan menguraikan lima syarat sistem akuntansi pertanggungjawaban untuk mengetahui apakah sistem akuntansi pertanggungjawaban telah diterapkan oleh perusahaan atau belum. Dari analisis data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat ditemukan berdasarkan data hasil penelitian dan penjelasan dapat diketahui hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Akuntansi pertanggung jawaban pengendalian biaya standar produk pada PT Perkebunan Nusantara II
Untuk mempertanggung jawabkan biaya yang telah dikeluarkan oleh suatu unit kepada manajer yang bertanggungjawab dalam laporan pertanggung jawaban harus ada keterangan mengenai besarnya anggaran realisasi dan penyimpangannya.
Pada PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa pelaporan biaya dari unit-unit kepada manajer yang bertanggung jawab sifatnya berupa nota-nota pengeluaran atau bukti-bukti kas keluar dan kas masuk tanpa adanya penjelasan mengenai anggaran, realisasi dan penyimpangannya. Kemudian bukti memorial tersebut dibuat laporan yang disertai anggaran realisasi dan selisihnya. Dan disamping itu PT Perkebunan Nusantara II setiap bulan atau setiap tahunnya mendatangkan pihak audit untuk melakukan pengecekan anggaran dan realisasinya.
Sistem akuntansi pertanggung jawaban merupakan sistem pengolahan informasi biaya, dengan cara menggolongkan, mencatat dan meringkas biaya dalam hubungannya dengan jenjang manajemen yang bertanggungjawab atas terjadinya biaya, dengan tujuan untuk menghasilkan informasi akuntansi pertanggungjawaban untuk pengendalian biaya. Sistem pelaporan biaya yang bertanggungjawab di PT Perkebunan Nusantara II sudah diterapkan yaitu dari unit-unit yang dibawahnya, masing-masing melaporkan biaya yang telah dikeluarkan oleh suatu unit.
2. Prosedur akuntansi pertanggung jawaban pengendalian biaya standar produk pada PT Perkebunan Nusantara II
PT Perkebunan Nusantara II dikatakan telah melakukan proses

penyusunan anggaran dengan cukup baik. Secara garis besar anggaran disusun dalam 2 bentuk yaitu RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) dan PPAP (Permintaan Pelaksanaan Anggaran Perusahaan).

a. Penyusunan RKAP

RKAP merupakan rancangan anggaran yang mana diajukan setiap bulan juli. Masing-masing bagian yang dibawah oleh manajer, yaitu asisten adminitrasi dan umum. Asisten tanaman masing-masing kebun, dan asisten teknik dan pengolahan masing-masing pabrik.

Asisten teknik dan pengolahan pabrik PT Perkebunan Nusantara II selaku pertanggung jawaban tertinggi pada pengolahan tebu juga menyampaikan rancangan anggaran biaya produksi untuk pengolahan tebu. Rancangan tersebut kemudian dibahas bersama para asisten lainnya dalam suatu rapat internal guna menyusun suatu RKAP.

Setelah RKAP disusun, maka RKAP tersebut diserahkan ke kantor direksi. Setelah dipelajari, direksi akan memutuskan apakah RKAP tersebut diterima atau ditolak. Setelah RKAP disetujui maka RKAP tersebut siap diaplikasikan ke masing-masing bagiannya. Manfaat adanya RKAP :

- 1) Masing-masing bagian dapat melakukan pengawasan terhadap belanja pada bagian yang dikontrolnya sehingga pengawasan tidak hanya terpusat pada bagian administrasi dan keuangan.
- 2) Pengawasan preventif, yang dimana RKAP tersebut berfungsi sebagai alat pencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- 3) Pengawasan terhadap realisasi RKAP juga berfungsi untuk melihat sejauh mana deviasi antara RKAP dengan realisasinya. Apakah muncul selisih yang cukup besar atau kecil antara keduanya tersebut.

b. Penyusunan PPAP

PPAP merupakan bagian dalam pengimplementasian suatu rencana anggaran. PPAP diajukan setiap 3 bulan sekali. Dalam penyusunan suatu PPAP harus berpedoman pada apa yang telah ditetapkan RKAP. Pengaplikasian suatu PPAP memiliki 2 prinsip, yaitu :

- 1) Suatu produksi boleh mengalami kenaikan atau tetap dari RKAP, namun tidak boleh sampai turun.
- 2) Suatu biaya boleh tetap lebih kecil dari RKAP, namun tidak boleh sampai lebih besar. PPAP yang telah disetujui direksi kemudian diotorisasi ke masing-masing bagian pengaplikasian keuangan dilakukan dalam 2 masa dalam 1 bulan itu

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang terdapat pada PT Perkebunan Nusantara II sudah terdapat pusat-pusat pertanggungjawaban dan sudah terdapat desentralisasi wewenang di dalamnya. Sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih antara wewenang dan tanggung jawab serta dapat bertanggungjawab atas

- aktivitas masing-masing pusat pertanggungjawaban.
2. Proses penyusunan anggaran PT Perkebunan Nusantara II telah mengikutsertakan para manajer pelaksana anggaran tersebut. Dengan demikian para manajer ikut berperan serta dalam penyusunan anggaran, sehingga para manajer merasa bertanggung jawab dengan anggaran yang mereka susun. Dengan begitu perusahaan telah memenuhi syarat kedua dari sistem akuntansi pertanggungjawaban yaitu anggaran biaya yang disusun menurut pusat-pusat pertanggungjawaban.
 3. Penggolongan biaya PT Perkebunan Nusantara II tidak berdasarkan pada dapat tidaknya biaya dikendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban, melainkan berdasarkan pemisahan biaya menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Pengendalian biaya dalam perusahaan berdasarkan anggaran yang disusun, dimana realisasi biaya diharapkan tidak melebihi jumlah biaya dalam anggaran. Sehingga pengendalian biaya yang terjadi kurang baik karena bila terjadi penyimpangan biaya akan sulit diketahui siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya biaya tersebut.
 4. Kode rekening yang digunakan oleh PT Perkebunan Nusantara II adalah kode rekening angka kelompok, sehingga biaya yang terjadi dapat langsung diidentifikasi kepada pusat biaya yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan sudah memenuhi syarat keempat dari sistem akuntansi pertanggungjawaban dengan memberi kode rekening pusat-pusat pertanggung jawaban.
 5. Syarat kelima dari sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab. Sistem pelaporan biaya yang bertanggung jawab pada PT Perkebunan Nusantara II sudah memenuhi syarat kelima ini karena pelaporan biaya yang terjadi berupa nota-nota dan laporan anggaran, realisasi dan penyimpangannya.

Saran

Memisahkan biaya produksi sesuai dengan dapat tidaknya biaya produksi dikendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban. Hal ini bertujuan agar dapat diketahui siapa atau pusat pertanggung jawaban mana yang bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan biaya sehingga pengendalian biaya produksi menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Carter, w. k. Akuntansi biaya. jakarta : salemba empat, 2009.
- Hutabarat. G. (2009). hubungan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan efektifitas pengendalian biaya produksi. Jurnal Akuntansi FE Unsil Vol. 3 No. 1 : 8-20.
- Firmansyah, I. Akuntansi biaya. Bandung: Dunia Cerdas, 2013
- aryoto. Dasar-dasar manajemen - Teori, Definisi, Konsep . Jogyakarta: Andi, 2016.
- Lubia, A. Akuntansi keperilakuan . Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2010.
- Mulyadi. Akuntansi Biaya. Yogyakarta: UPP-Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015

- Olivia, S. penerapan akuntansi pertanggung jawaban sebagai alat pengendalian untuk penilaian kinerja pada PT. Pelayanan Nasional Indonesia cabang Belitung. Skripsi Universitas Samratulangi, 2013.
- Rompas. akuntansi pertanggung jawaban dalam menilai kinerja manajer pusat biaya pada PT.Bank Mega TBK cabang Manado.Skripsi universitas samratulangi, 2015.
- Samryn. Akuntansi manajemen buku edisi revisi . Jakarta: Percetakan PT Fajar Interpratama mandiri, 2012.
- setiyanto, A. I. (2017). Pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya pada industri manufaktur di Batam. Jurnal Riset Akuntansi Vol.)no. 01 :43-50
- Sugiyono, P. Metode penelitian. Bandung: Alfabeta cv, 2017.
- Syukron, a. manajemen industri. yogyakarta: graha ilmu, 2014.
- Utari dkk, D.,Purwanti,A.,& Prawinegoro Akuntansi Manajemen. Jakarta: Mitra Wacana Media, [2016.
- Yogi, s. Penerapan akuntansi pertanggung jawaban sebagai alat penilaian pusat biaya pada PT. Bangun Kubah Surabaya. Skripsi sekolah tinggi ilmu ekonomi (STIE SIA), 2014.